



**LAPORAN
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH
DAERAH**

LPPD

TAHUN 2019

DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT
Jl. Khatib Sulaiman No. 5 Padang

DAFTAR ISI

I. URUSAN KONKUREN

A. Urusan Wajib yang Dilaksanakan.....	1
A. Program dan Kegiatan	1
B. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	23
C. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggaran Urusan Wajib	24
D. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional	25
E. Alokasi dan Realisasi Anggaran	25
F. Proses Perencanaan Pembangunan	31
G. Kondisi Sarana dan Prasarana	32
H. Permasalahan dan Solusi	32

II. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

A. Tugas Pembantuan yang Diterima	
1. Dasar Hukum	34
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan	34
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan	34
4. Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya	34
5. Jumlah Anggaran	34
6. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan	34
7. Permasalahan dan Solusi	34

III. PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

A. Urusan Sosial (Dinas Sosial)	36
---------------------------------------	----

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan	39
B. Saran	39

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) TAHUN ANGGARAN 2019 DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT

BAB III URUSAN KONKUREN

A. Urusan Wajib yang Dilaksanakan

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu Instansi penyelenggara Pemerintahan dan Pembangunan mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang sosial serta tugas pembantuan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud maka Dinas Sosial mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang sosial;
2. Penyelenggaran urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang sosial;
3. Pembinaan dan fasilitas bidang sosial, lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
4. Pelaksanaan kesekretariatan dinas;
5. Pelaksanaan tugas di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitas Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Penanganan Fakir Miskin;
6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sosial; dan
7. Pelaksanaan tugas yang lain diberikan oleh gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

1. Program dan Kegiatan

Berdasarkan kewenangan dan arah kebijakan umum pembangunan bidang kesejahteraan sosial, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 yang tertuang dalam dokumen RPJMD 2016-2021, kegiatan pembangunan bidang kesejahteraan sosial mencakup pada 15 (lima belas) program urusan sosial. Adapun Program dan Kegiatan pada urusan wajib bidang sosial sebagai berikut :

a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Program ini terdiri dari 13 (tiga belas) kegiatan yang dipergunakan untuk memenuhi belanja pelayanan perkantoran selama 1 tahun. Kegiatan dimaksud sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- 3) Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor;
- 4) Penyediaan Alat Tulis Kantor;

- 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- 6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- 7) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- 8) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
- 9) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- 10) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah;
- 11) Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi;
- 12) Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur.
- 13) Penyediaan Makanan dan Minuman;

b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Mencakup 13 (tiga belas) kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pengadaan Meubeleur;
- 2) Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi;
- 3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi;
- 4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
- 5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
- 6) Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi;
- 7) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor;
- 8) Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan;
- 9) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan;
- 10) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
- 11) Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor;
- 12) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- 13) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor;
- 14) Pemeliharaan Rutin/Berkala Monumen dan Bangunan Sejarah;

c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini berisikan kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya untuk PNS Dinas Sosial dan UPTD yaitu Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.

d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini berisi kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan yang bertujuan untuk meningkatkan Sumber Daya Aparatur

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

e) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; kegiatan pada program ini berjumlah 6 kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD;
- 2) Penatausahaan Keuangan SKPD;
- 3) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- 4) Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD;
- 5) Penyusunan Sinergitas Program Antar Kab/Kota;
- 6) Pengelolaan, Pengawasan, dan Pengendalian Aset OPD.

f) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial; dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Bimbingan Teknis Satuan Bakti Pekerja Sosial

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan meningkatnya kualitas Satuan Bakti Pekerja Sosial dalam melaksanakan tugas sebagai pilar-pilar pembangunan kesejahteraan sosial ditengah masyarakat. Kegiatan ini diikuti oleh 50 orang Sakti Peksos dari Kab/ Kota.

- 2) Sosialisasi Kegiatan Unit Institusi Layanan Sosial (UILS)

Tujuan kegiatan ini adalah bertambahnya pengetahuan dinas terkait, lembaga kemasyarakatan, pemerintah kab/kota terkait tentang Unit Institusi Layanan Sosial (UILS); terwujudnya hak penyandang disabilitas mental untuk mendapatkan keterampilan, pengetahuan dan bimbingan sosial, ekonomi dan budaya, sesuai dengan anamat Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas; terwujudnya kepedulian, kesempatan dan peluang bagi pemerintah, pemerintah daerah, profesi pekerjaan sosial dan berbagai profesi yang relevan serta masyarakat luas dalam pengembangan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental; terwujudnya pemahaman masyarakat tentang permasalahan penyandang disabilitas mental, termasuk upaya deteksi dini dan penanganannya berbasis masyarakat. Jumlah peserta kegiatan ini adalah 60 orang.

- 3) Rujukan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;

Adapun bentuk kegiatannya yaitu Rujukan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial berupa pemberian rujukan terhadap penyandang masalah kesejahteraan

sosial se-Sumatera Barat yang dikirim Panti Sosial yang berada di Provinsi Bengkulu guna menjalani rehabilitasi dan pembinaan.

- 4) Sosialisasi Program Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH); Anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut sebagai anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang menjadi korban dan saksi. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH dapat mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH. Kegiatan ini diikuti oleh 50 orang peserta.

g) Program Pembinaan Anak Terlantar

Anak Terlantar merupakan penyebab dominan dari ketidakmampuan orang tua yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Selain itu, akibat orang tua/dan/atau keluarga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan anaknya dengan pelbagai alasan menjadikan anak-anak mereka terlantar. Dikategorikan anak terlantar apabila :

- 1) Seseorang berusia 5 - 18 tahun;
- 2) Anak yatim, piatu, yatim piatu maupun masih mempunyai kedua orang tua;
- 3) Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya; dan
- 4) Anak yang lahir karena pemerkosaan, tidak ada yang mengurus dan tidak mendapatkan pendidikan.

Adapun kegiatan pada Program ini sebagai berikut :

- 1) Biaya Pendidikan Klien (PSAA Tri Murni);
Pengadaan biaya pendidikan bagi 100 orang anak perempuan klien PSAA Tri Murni terdiri dari belanja peralatan/ perlengkapan, uang sekolah klien dan uang saku klien. Biaya pendidikan dimaksudkan agar kebutuhan pendidikan untuk 1 tahun terpenuhi.

2) Tim PIPA (Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak)

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah wadah koordinasi lintas instansi secara terpadu dan komprehensif untuk memberikan verifikasi terhadap anak yang akan dijadikan anak angkat oleh calon orang tua angkat dan agar terjalinnnya koordinasi dengan instansi terkait dalam izin pengangkatan anak. Sasaran kegiatan ini adalah 25 orang.

3) Pengadaan Kelengkapan Klien;

Pengadaan kelengkapan klien pada PSAABR Budi Utama Lubuk Alung, PSAA Tri Murni, dan PSBR Harapan Padang Panjang sejumlah 455 orang klien terdiri dari 155 orang anak laki-laki dan 300 orang anak perempuan. Kegiatan ini untuk membiayai kebutuhan harian, kebutuhan pakaian sekolah dan penyediaan kebutuhan materi (uang jajan dan uang saku) bagi anak asuh serta anak yang mendapatkan pelayanan keterampilan.

4) Pengadaan bahan Obat-obatan dan Dokter Pakai Habis;

Penyediaan bahan obat-obatan dan dokter pakai habis, telah dilaksanakan selama 1 tahun pada PSAABR Budi Utama Lubuk Alung, PSAA Tri Murni dan PSBR Harapan Padang Panjang, adapun obat-obatan yang disediakan adalah obat-obatan ringan beserta masing-masing seorang tenaga medis.

5) Pelatihan Keterampilan dan Praktik Belajar bagi Anak Terlantar (PSAABR Budi Utama Lubuk Alung);

Kegiatan ini dimaksudkan agar anak terlantar laki-laki kurang mampu yang putus sekolah dapat dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat hidup mandiri. Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 tahun untuk 2 angkatan (160 orang) dengan masing-masing angkatan berjumlah 80 orang terdiri dari:

- Jurusan Otomotif = 40 orang
- Jurusan elektronika = 40 orang
- Jurusan Las Karbit/Listrik = 40 orang
- Jurusan Instalasi Listrik = 40 orang

6) Seleksi Penerimaan Calon Klien;

Seleksi penerimaan calon klien dimaksudkan agar klien yang akan diterima pada Panti Sosial PSAABR Budi Utama Lubuk Alung, PSAA Tri Murni, dan

PSBR Harapan Padang Panjang telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan. Kegiatan ini dilaksanakan terhadap 65 orang anak.

7) Penyediaan Bahan Pendidikan;

Penyediaan bahan pendidikan bagi klien PSABR Budi Utama Lubuk Alung, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan (sekolah) anak asuh sebanyak 75 orang anak selama 1 tahun.

8) Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti (PSAABR Budi Utama Lubuk Alung);

Pendidikan dan pelatihan anak asuh bagi 75 orang klien PSAABR Budi Utama Lubuk Alung dimaksudkan agar anak asuh yang dibina dan dilayani mendapatkan peningkatan pendidikan yang lebih baik dan mendapat pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas diri sebagai bekal setelah dari Panti Sosial.

9) Rapat Koordinasi Pelayanan dan Rehabilitasi Kesos Anak;

Rapat Koordinasi Pelayanan dan Rehabilitasi Kesos Anak, bertujuan untuk menyampaikan informasi tentang Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Anak khususnya Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA), Program Kesejahteraan Sosial Bagi Anak Yang Membutuhkan Perlakuan Khusus (AMPK), serta untuk terjalinnya koordinasi antar pengurus panti sosial swasta dengan petugas Dinas Sosial Kab/Kota. Sasaran pada kegiatan ini berjumlah 125 orang.

10) Pengadaan Makanan dan Minuman;

Pengadaan makanan dan minuman (biaya makan klien) selama 1 tahun pada PSAABR Budi Utama Lubuk Alung, PSAA Tri Murni dan PSBR Harapan Padang Panjang sebanyak 455 orang terdiri dari 155 orang laki-laki, 300 orang perempuan.

11) Pelatihan Keterampilan dan Praktik Belajar bagi Anak Terlantar (PSBR Harapan Padang Panjang);

Pelatihan Keterampilan dan Praktik Belajar Bagi Anak Terlantar di PSBR Harapan Padang Panjang, dimaksudkan agar anak terlantar perempuan kurang mampu yang putus sekolah terpenuhi kebutuhan untuk

memperoleh pengetahuan, keterampilan/ keahlian sehingga dapat hidup mandiri dengan norma dan etika. Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 tahun untuk 2 angkatan (200 orang anak perempuan) dengan masing-masing angkatan berjumlah 100 orang terdiri dari :

- Jurusan Kostum
- Jurusan Bordir

12) Sehari Bersama Anak;

Sehari Bersama Anak, adalah perwujudan dari Keppres Nomor 4 tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional seiring dengan ditetapkannya UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka peringatan Hari Anak Nasional tahun 2018 merupakan momentum yang tepat untuk menggugah dan membangkitkan segenap komponen bangsa (pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua) akan pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak anak, termasuk pemenuhan layanan perlindungan dan kesejahteraannya. Untuk tahun anggaran 2019 jumlah sasaran kegiatan ini sebanyak 200 orang.

Tujuan umum peringatan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta bersama dengan pemerintah dalam menyelenggarakan upaya pembinaan dan pengembangan anak secara integratif holistik dan berkesinambungan serta meningkatkan kesadaran pemerintah, masyarakat, orang tua dan segenap komponen bangsa untuk memenuhi hak-hak anak berdasarkan *Child Right*, dan menghindari anak-anak dari penyiksaan, penelantaran, eksploitasi kekerasan terhadap anak, diskriminasi, pemakaian obat-obatan terlarang, pornografi, dan lain-lain.

13) Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti (PSAA Tri Murni);

Pendidikan dan pelatihan bagi 100 orang anak perempuan klien PSAA Tri Murni dimaksudkan agar anak asuh yang dibina dan dilayani mendapatkan peningkatan pendidikan yang lebih baik dan mendapat pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas diri sebagai bekal setelah dari Panti Sosial.

h) Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Eks Trauma

Penyandang cacat (disabilitas) adalah seseorang yang mengalami hambatan fisik mental atau fisik dan mental sehingga mengganggu

pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar yang terdiri dari: penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental. Pembinaan para panyandang cacat dilaksanakan secara sistem panti dengan tujuan agar dapat menjamin dan melindungi penyandang disabilitas dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

1) Penyediaan bahan Obat-obatan dan Dokter Pakai Habis;

Penyediaan bahan obat-obatan dan dokter pakai habis, pada PSBG Harapan Ibu Padang dan PSBN Tuah Sakato Padang, dilaksanakan selama 1 tahun untuk 150 orang anak berupa penyediaan obat-obatan ringan serta penyediaan seorang tenaga medis yang ditunjuk oleh Puskesmas setempat.

2) Rehabilitasi Sosial Terhadap Penyandang Disabilitas melalui Loka Bina Karya (LBK).

Salah satu upaya rehabilitasi sosial terhadap penyandang disabilitas yang dilakukan pemerintah adalah dengan melaksanakan program pelayanan Sosial Penyandang Disabilitas melalui dua pendekatan, yaitu melalui program pelayanan dalam panti dan program pelayanan luar panti. Kedua program ini berjalan secara beriringan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Penyandang Disabilitas. Rehabilitasi sosial terhadap penyandang disabilitas melalui Loka Bina Karya pada tahun 2019 diberikan kepada 15 orang peserta.

3) Biaya Kelengkapan Klien;

Biaya kelengkapan klien pada PSBG Harapan Ibu Padang dan PSBN Tuah Sakato Padang dengan jumlah kelayan 150 orang anak untuk 1 tahun, biaya kelengkapan ini dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan harian kelayan, kebutuhan praktek dan penyediaan kebutuhan ekstra kurikuler (olahraga, kesenian, pramuka).

4) Pemberian Penghargaan bagi Tokoh yang Peduli pada Penyandang Disabilitas;

Kegiatan ini merupakan apresiasi terhadap masyarakat yang peduli terhadap keberadaan para penyandang disabilitas. Pada tahun ini diberikan penghargaan kepada 54 orang tokoh masyarakat.

5) Pendayagunaan para Penyandang Disabilitas;

Pendayagunaan para penyandang disabilitas yang dilaksanakan di PSBG Harapan Ibu Padang kepada 100 orang klien (50 orang laki-laki dan 50 orang perempuan) selama 1 tahun, salah satu tujuan dari kegiatan ini adalah untuk dapat mendukung pemenuhan kebutuhan sosial, fisik, mental dan keterampilan bagi anak retardasi mental yang mampu didik dan mampu latih sehingga mereka bisa hidup mandiri di tengah-tengah keluarga dan masyarakat, disamping itu sasaran kegiatan ini juga bagi orang tua kelayan agar mereka dapat melanjutkan proses pelayanan dan rehabilitasi serta pembinaan lanjut sebagai upaya dan rasa tanggungjawab keluarga.

6) Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Disabilitas;

Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Disabilitas dan Eks Trauma, dilaksanakan selama 1 tahun di Panti Sosial Bina Netera "Tuah Sakato" Padang untuk klien yang berjumlah 50 orang (36 laki-laki dan 14 perempuan), tujuan dari pelatihan ini adalah untuk membina dan memperbaiki sikap mental para penyandang cacat netra dari sifat konsumtif kepada sifat produktif, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para penyandang cacat netra sebagai modal dasar dalam menjalani kehidupan ditengah-tengah masyarakat serta untuk terbina dan terentasnya penyandang cacat netra sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya dalam tatanan kehidupan sehari-hari.

Pelatihan yang diberikan berupa pembinaan KUBE dengan memberikan bimbingan, metode dan teknis pelayanan prima kepada pasien serta pembinaan pengelolaan klinik pijat dan pengadministrasian keuangan yang baik.

7) Penguatan Motivasi Penyandang Disabilitas.

Penguatan motivasi penyandang disabilitas bertujuan untuk memberikan motivasi sosial bagi masyarakat terhadap penyandang disabilitas dengan jumlah sasaran 150 orang.

8) Bimbingan Sosial bagi PSM/ TKSK;

Bimbingan Sosial ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan pencerahan kepada 68 orang pendamping agar petugas dari kabupaten/

kota selaku petugas pelaksana dan pendamping memahami tentang kriteria penerima bantuan dan tatacara pendampingan terhadap penerima bantuan jaminan sosial/ asistensi sosial terhadap penyandang disabilitas berat.

9) Biaya Makan dan Minum Klien;

Biaya makanan dan minuman klien yang dilaksanakan selama 1 tahun pada PSBG Harapan Ibu Padang dan PSBN Tuah Sakato Padang, dengan jumlah klien 150 orang terdiri dari 92 orang laki-laki dan 58 orang perempuan.

i) Program Pembinaan Panti Lanjut Usia Terlantar

Panti asuhan lansia adalah lembaga kesejahteraan sosial yang mempunyai tugas memberikan bimbingan dan pelayanan bagi lanjut usia terlantar agar dapat hidup secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat (Kepmensos No. 50/HUK/2004).

Adapun kegiatan program ini sebagai berikut :

1) Penyediaan bahan Obat-obatan dan Dokter Pakai Habis;

Penyediaan bahan obat-obatan Jompo, dilaksanakan selama 1 tahun pada PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin dan PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar sebanyak 180 orang. Adapun obat-obat yang disediakan berupa obat-obatan ringan dan penyediaan seorang tenaga medis yang ditunjuk.

2) Biaya Jasa Penguburan/Pemulangan Klien;

Biaya Jasa Penguburan / Pemulangan Klien, pada PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin dan PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar selama 1 tahun, yang dipergunakan untuk biaya penguburan dan pemulangan kelayan kepada keluarganya setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan di dalam panti.

3) Lanjut Usia Berkreasi.

Lanjut Usia Berkreasi bertujuan:

- a) Untuk melembaganya nilai-nilai masyarakat agar selalu menghargai keberadaan lanjut usia.
- b) Meningkatkan kesadaran para lanjut usia, keluarga dan masyarakat akan arti pentingnya makna kehidupan berbangsa dan bernegara melalui berbagai kegiatan terpadu antara masyarakat dan pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial.

- c) Termotivasinya dan Bergeraknya lanjut usia, keluarga, organisasi sosial, masyarakat dan dunia usaha dan upaya meningkatkan kesejahteraan lanjut usia dengan mengembangkan jiwa dan semangat kebersamaan keluarga lanjut usia.
- d) Adapun sasaran kegiatan ini sejumlah 250 orang.
- 4) Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti Jompo;
Pendidikan dan Pelatihan bagi penghuni panti jompo, di PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin dan PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar dengan jumlah klien 180 orang (106 orang laki-laki dan 74 orang perempuan). Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bimbingan mental, sosial, keterampilan dan kesenian kepada para lanjut usia terlantar agar mereka dapat menjalani hari tuanya dengan kegiatan yang bermanfaat serta untuk menumbuhkan rasa percaya diri.
- 5) Biaya Kelengkapan Klien Panti Jompo;
Biaya kelengkapan klien panti jompo, pada PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin dan PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan harian serta memenuhi bahan pelatihan kelayan lanjut usia, dengan tujuan agar lanjut usia terlantar dapat mengisi hari-hari tuanya dengan kegiatan yang bermanfaat, dilaksanakan selama 1 tahun untuk 180 orang klien terdiri dari 106 orang laki-laki dan 74 orang perempuan.
- 6) Biaya Makanan dan Minimum Klien di Panti Jompo;
Biaya makan dan minum kelayan Jompo, pada PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin dan PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar, berjumlah 110 orang di PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin dan 70 orang di PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar yang dilaksanakan selama 1 tahun.

j) Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pengadaan Kelengkapan Klien;
Pengadaan kelengkapan (biaya klien) dilaksanakan selama 1 tahun untuk di PSKW Andam Dewi Sukarami Solok yang berjumlah 40 orang, kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan harian klien.

- 2) Biaya Obat-obatan dan Dokter Pakai Habis;
Biaya obat-obatan, dilaksanakan selama 1 tahun pada PSKW Andam Dewi dengan penyediaan obat-obatan ringan serta tenaga medis, banyaknya sasaran kegiatan ini 40 orang klien.
- 3) Pengadaan Makanan dan Minuman;
Pengadaan makanan dan minuman pada PSKW Andam Dewi Sukarami Solok selama 1 tahun untuk 40 orang.
- 4) Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial;
Pendidikan dan Pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyakit sosial pada PSKW Andam Dewi Solok, kegiatan ini bertujuan untuk memulihkan dan mengembangkan tingkah laku positif eks Wanita Tuna Susila sehingga mereka mau dan mampu melakukan fungsi dan peran sosialnya secara wajar serta meningkatkan ketahanan sosial warga binaan terhadap pengaruh buruk lingkungan dengan memberikan bekal agama dan norma etika sehingga warga binaan dapat menjalankan kehidupan dengan baik sesuai dengan kaidah agama dan etika.

k) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Kelembagaan Kesejahteraan Sosial merupakan Organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum (UU No.11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial).

Adapun kegiatan program ini sebagai berikut:

- 1) Bimbingan Kapasitas bagi Pengurus Karang Taruna se-Sumatera Barat;
Sasaran kegiatan ini sejumlah 1.811 orang dengan tujuan membekali kemampuan dan keberfungsian Karang Taruna dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial di tengah masyarakat.
- 2) Penilaian PSKS (Karang Taruna, Orsos, PSM, TKSK) berprestasi Tingkat Sumatera Barat;
Penilaian PSKS (Karang Taruna, Orsos, PSM, TKSK) Berprestasi Tk. Sumatera Barat bertujuan :

- a) Untuk meningkatkan motivasi dan etos kerja PSKS dalam mengemban misi dan kontribusi bidang pengembangan kesejahteraan sosial di lapangan;
- b) Melihat sejauh mana dedikasi dan prestasi pada PSKS dalam melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial; dan
- c) Untuk menentukan PSKS yang berprestasi Tk. Sumatera Barat.

Sasaran kegiatan ini berjumlah 32 orang.

- 3) Pertemuan Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat (FK-PSM) se-Sumatera Barat.

Kegiatan ini bertujuan agar PSM se-Sumatera Barat saling berbagi pengalaman dan menyampaikan permasalahan yang dihadapi serta solusi bagi mereka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, dimana kegiatan ini diikuti oleh 50 orang.

- 4) Bimbingan Kapasitas bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan se-Sumatera Barat;

Sasaran kegiatan ini sejumlah 50 orang dengan tujuan membekali kemampuan para TKSK dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial di tengah masyarakat.

- 5) KSN Expo dan Award dalam HKSAN;

KSN Expo dan Award Dalam HKSAN, bertujuan sebagai media publikasi dan promosi berbagai pihak, instansi pemerintah, dunia usaha, organisasi non pemerintah/LSM, dunia pendidikan dan pelaku usaha lain yang melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk upaya menuju Indonesia sejahtera.

- 6) Pelatihan Lanjutan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) se-Sumatera Barat;

Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan Pekerja Sosial Masyarakat dalam menjalankan fungsinya. Kegiatan ini diikuti oleh 165 orang PSM se-Sumatera Barat.

- 7) Penguatan Nilai-Nilai KSN;

Penguatan Nilai-nilai KSN tahun 2019, yang jatuh pada tanggal 20 Desember setiap tahunnya merupakan momentum untuk menumbuhkembangkan dan melestarikan nilai-nilai kesetiakawanan sosial untuk didayagunakan sehingga menjadi bagian dari sikap dan perilaku

sehari-hari bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta mendayagunakan peran aktif masyarakat luas khususnya masyarakat mampu secara melembaga dan berkelanjutan untuk mengatasi dan menanggulangi permasalahan sosial. Pelaksanaan kegiatan ini dalam bentuk pertandingan olah raga yang diikuti oleh 800 orang peserta dengan tema “Kesetiakawanan Sosial Menembus Batas.”

- 8) Bimbingan Jejaring Kerja LKS/ Orsos se-Sumatera Barat dalam rangka Akreditasi.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan pengurus LKS/Orsos sejumlah 50 orang di bidang administrasi manajemen orsos dan bidang pelayanan sosial. Tujuan kegiatan ini adalah :

- a) Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan pengurus LKS/Orsos dalam pengelolaan manajemen kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 - b) Meningkatnya kinerja LKS/Orsos dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya menuju kemandirian;
 - c) Terwujudnya administrasi LKS/Orsos dengan baik; dan
 - d) Terhimpunnya LKS/Orsos yang di akreditasi dan diusulkan pada Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI di Jakarta.
- 9) Penguatan Peran LKS Posdaya dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- Tujuan kegiatan ini adalah untuk menanggulangi masalah sosial seperti kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat akan mampu menyelesaikan masalah sosial di lingkungannya sendiri secara bersama-sama, dan bahkan diharapkan dapat secara bersama-sama pula mengembangkan potensi diri sehingga dapat diwujudkan masyarakat maju dan berkembang. Jumlah sasaran sebanyak 640 orang.
- 10) Penguatan Kelembagaan LKKS Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat;
- Penguatan Kelembagaan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Sosial (LKKS) se-Sumatera Barat bertujuan memberikan motivasi kepada pengurus LKKS Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam membina dan

mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Sasaran kegiatan sejumlah 180 orang pengurus.

11) Penyuluhan Kesejahteraan Sosial;

Penyuluhan Kesejahteraan Sosial, dilaksanakan bertujuan untuk menyebarluaskan informasi, komunikasi, inovasi dan edukasi melalui media cetak, media elektronik dan televisi terhadap kelompok sasaran ke arah yang lebih baik serta untuk terwujudnya pemahaman yang sama kepada para pelaku program penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam pelaksanaan penyuluhan sosial guna mendukung keberhasilan program-program dari kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Sasaran kegiatan ini berjumlah 3.260 orang.

12) Forum Komunikasi Pengurus Karang Taruna se-Sumatera Barat;

Kegiatan ini diikuti oleh 50 orang pengurus Karang Taruna se-Sumatera Barat. Tujuannya untuk meningkatkan koordinasi pengurus Karang Taruna di Sumatera Barat dalam melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial.

13) Pelatihan Dasar Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) se-Sumatera Barat;

Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan Pekerja Sosial Masyarakat dalam menjalankan fungsinya. Kegiatan ini diikuti oleh 685 orang PSM se-Sumatera Barat.

14) Penguatan Peran Pilar dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

Koordinasi dilaksanakan dengan 19 Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat untuk menguatkan Jejaring Kerja Lembaga kesejahteraan sosial dan temu koordinasi kesejahteraan sosial yang diikuti oleh 180 orang peserta.

15) Bimbingan Pengurus Organisasi Sosial se-Sumatera Barat;

Bimbingan bagi Pengurus Organisasi Sosial se Sumatera Barat bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pengurus orsos dalam mengelola manajemen kualitas pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kinerja orsos dalam melaksanakan tugas dan fungsi menuju kemandirian serta mewujudkan administrasi orsos dengan baik. Sasaran kegiatan ini berjumlah 50 orang.

m) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Penetapan Calon Lokasi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT);
Pemberdayaan Komunitas Adat terpencil (PKAT) merupakan salah satu bentuk kepedulian dan komitmen pemerintah dalam mempercepat proses pembangunan terhadap mereka yang masih belum tersentuh proses Pembangunan Nasional yang umumnya berada pada daerah-daerah yang sulit dijangkau. Fokus perhatian Pemberdayaan KAT adalah mereka yang berada di daerah terpencil baik secara geografis, sosial budaya, ekonomi maupun politik. Beberapa tahapan yang dilakukan dalam Pemberdayaan KAT berupa:
 - a) Penjajagan Awal, tujuannya adalah untuk (1) menemukan sekaligus menghimpun data etnologi KAT dalam suatu wilayah untuk mendapatkan data awal tentang Komunitas Adat Terpencil, (2) Menghimpun data potensi dan sumber daya alam serta sumber daya manusia, dan (3) Menetapkan katagori Komunitas Adat terpencil sesuai dengan kriteria dan kenyataan di lapangan.
 - b) Semiloka Daerah Hasil Studi Kelayakan bertujuan untuk memperoleh masukan bentuk kegiatan Pemberdayaan KAT dan dukungan keterpaduan program dari Dinas/Instansi terkait serta masyarakat maupun Perguruan Tinggi sebagai acuan pelaksanaan pemberdayaan selanjutnya serta membahas kelayakan lokasi sebagai suatu calon lokasi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Sumatera Barat tahun 2019.
- b. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
Pengukuran kepuasan masyarakat merupakan elemen penting dalam menyediakan pelayanan yang efektif, efisien, dan inovatif. Hal ini sangat esensial karena berhubungan dengan pelayanan publik. Hal yang diharapkan dari kegiatan ini adalah didapatkannya gambaran tentang tingkat kepuasan dan pendapat masyarakat atas pelayanan kesejahteraan sosial yang telah diperoleh.

Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat maka pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat sudah masuk dalam kategori mutu pelayanan B atau Baik.

c. Pengkajian Gelar Calon Pahlawan Nasional

Kegiatan ini bertujuan untuk mengkaji dan memverifikasi tokoh yang akan diusulkan untuk diberi gelar calon pahlawan nasional. Pengkajian melibatkan perguruan tinggi dan akademisi/ sejarawan. Calon yang diusulkan berjumlah 3 orang.

d. Pelayanan Orang Terlantar;

Kegiatan ini dialokasikan untuk pemulangan orang terlantar sejumlah 38 orang dalam 1 tahun anggaran.

e. Sumatera Barat Expo 2019 (Publikasi Pembangunan Kesejahteraan Sosial)

Kegiatan ini dilakukan untuk mempublikasi kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun ini kegiatan diselenggarakan di Medan, Sumatera Utara.

f. Bimbingan Pemantapan Pengurus LK3 Kab/Kota;

Bimbingan Pemantapan Pengurus LK3 Kab/Kota, bertujuan untuk meningkatkan kinerja Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kab/Kota dan LK3 Berbasis Masyarakat agar lebih profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sebagai tempat layanan informasi, konsultasi rujukan dalam penanganan permasalahan keluarga sesuai dengan kebutuhan, serta sebagai bahan evaluasi bagi Dinas Sosial dari segi mana LK3 masih memiliki kelemahan / kendala dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial, sehingga dapat dijadikan bahan penyusunan program serta langkah-langkah Pemberdayaan Keluarga selanjutnya. Sasaran kegiatan ini sebanyak 50 orang pengurus LK3.

g. Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Komunitas Adat Terpencil;

Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Komunitas Adat Terpencil, dilaksanakan dalam rangka menciptakan warga dampingan dan petugas pendamping serta masyarakat eks warga yang terampil mandiri, dalam berusaha guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan

memanfaatkan bahan alam yang ada di sekitar kebun dan tanaman masyarakat tersebut. Kegiatan ini diikuti oleh 30 KK warga KAT.

h. Bimbingan Teknis Pemantapan Petugas Pendata PMKS

Kegiatan ini diikuti oleh 96 orang TKSK dari Kabupaten/Kota. Tujuannya adalah agar petugas pendata dapat meningkatkan kinerjanya dalam melakukan pendataan PMKS yang ada di Sumatera Barat.

i. Sosialisasi Undian Berhadiah Gratis (UGB)

Sosialisasi dilaksanakan pada petugas yang menangani UGD pada Dinas Sosial Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat bertujuan meningkatkan pemahaman tentang UGB dengan jumlah sasaran 25 orang.

j. Bimbingan Keterampilan Berusaha bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE);

Bimbingan keterampilan bagi keluarga rentan dan WRSE di Sumatera Barat, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan manajemen usaha keluarga (KK) rentan miskin dalam mengelola dan mengembangkan usahanya sehingga dapat membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari. Kegiatan ini diikuti oleh 15.890 orang.

k. Pembuatan Buku Data PMKS dan PSKS

Kegiatan ini bertujuan untuk membuat dokumentasi tentang populasi PMKS dan PSKS yang lengkap, akurat, dan mutakhir sebagai bahan masukan untuk membuat perencanaan dan mengambil keputusan.

n) Program Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial

Adapun kegiatan pada program ini sebagai berikut:

a. Bantuan Logistik Bencana;

Kegiatan ini berupa penyediaan logistik bencana yang didistribusikan kepada Dinas Sosial Kab/Kota se-Sumatera Barat.

b. Rakor Bencana Sosial

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi ASN dan masyarakat dalam menangani bencana sosial yang terjadi. Kegiatan ini diikuti oleh 59 orang peserta.

c. Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Logistik Bencana Sosial

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ASN dan masyarakat dalam menyusun laporan logistik bencana sosial. Kegiatan ini diikuti oleh 45 orang peserta.

d. Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Logistik Bencana Sosial

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ASN dan masyarakat dalam menyusun laporan logistik bencana alam. Kegiatan ini diikuti oleh 60 orang peserta.

e. Rapat Koordinasi Program Keluarga Harapan;

Program Keluarga harapan (PKH) adalah program bantuan social bersyarat (*conditional cash transfer*) yang diberikan kepada keluarga miskin yang memiliki kondisional kesehatan dan pendidikan. Kegiatan PKH bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, meningkatkan taraf hidup KPM melalui akses layanan pendidikan dan kemiskinan, mendorong perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam hidup sehat dan pendidikan berkelanjutan, dan mendorong inklusi keuangan bagi masyarakat miskin.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatnya koordinasi pendamping dan operator PKH di Kab/Kota sejumlah 35 orang.

f. Pemantapan Tim Psikososial Korban Bencana Alam;

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Tim Psikosal Korban bencana Alam sejumlah 50 orang.

g. Pemantapan Tim TRC Bencana Alam;

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Tim TRC Bencana Alam sejumlah 50 orang. Pemantapan Tim TRC Bencana Alam;

h. Sinergitas Program Keluarga Harapan;

Kegiatan ini diikuti oleh 76 orang koordinator pendamping PKH dan operator Kab/Kota se-Sumatera Barat.

i. Peningkatan Capacity Building Program Keluarga Harapan;

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pendamping dan operator PKH di Kab/Kota sejumlah 76 orang

o) Program Pemberdayaan Fakir Miskin

a. Bimbingan Teknis Petugas Verifikasi dan Validasi BDT

Kegiatan ini diikuti oleh 57 orang petugas verifikasi dan validasi BDT dari Kabupaten/Kota. Tujuannya adalah agar petugas dapat meningkatkan akurasi dalam melakukan Verifikasi dan Validasi BDT yang ada di Sumatera Barat.

b. Pengadaan Beras Untuk Panti Swasta se-Sumatera Barat;

Pengadaan Beras Untuk Panti Sosial Swasta bertujuan membantu Panti Sosial swasta dalam memenuhi kebutuhan dasar pangan bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial di dalam Panti dengan jumlah penerima sejumlah 4.000 orang.

c. Bimbingan Pemantapan Pendamping Bantuan Pangan Non Tunai

Kegiatan ini diikuti oleh 60 orang Pendamping Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Kabupaten/Kota. Tujuannya adalah agar pendamping dapat melakukan pendampingan dalam penyaluran BPNT di Sumatera Barat.

d. Seleksi Penghargaan KUBE dan Pendamping KUBE Berprestasi;

Seleksi dan Penghargaan KUBE dan Pendamping KUBE Berprestasi, merupakan media untuk meningkatkan motivasi pendamping dan warga miskin untuk lebih maju secara ekonomi dan sosial, meningkatkan interaksi dan kerjasama dalam kelompok, mendayagunakan potensi dan sumber daya sosial dan ekonomi lokal, memperkuat budaya kewirausahaan, mengembangkan akses pasar dan menjalin kemitraan sosial ekonomi dengan berbagai pihak. Tujuan dari kegiatan ini adalah:

a) Untuk mewujudkan penilaian yang obyektif dan partisipatif untuk memungkinkan terjalannya pengalaman, prestasi dalam pengelolaan KUBE FM, serta pendamping berprestasi.

b) Mwujudkan media tukar pengalaman antar pengurus KUBE, serta pendamping secara kondusif yang dapat menggambarkan perkembangan dan dinamika KUBE serta pendamping.

- c) Muwujudkan kompetisi sehat, spontan dan menjunjung nilai –nilai kebersamaan dalam berprestasi.
- d) Terjalannya KUBE dan Pendamping KUBE Berprestasi Tk. Provinsi Sumatera Barat untuk diikutsertakan pada seleksi tingkat Nasional tahun 2019.
- e) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat fakir miskin yang menjadi anggota kelompok KUBE.
- e. Bantuan Pengembangan E-Warong KUBE Jasa Perkotaan dan UMKM;
Bantuan pengembangan E-Warong KUBE Jasa Perkotaan dan UMKM dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan fakir miskin tentang elektronik warung gotong royong (E-Warong). Fasilitas ini untuk memenuhi kebutuhan pangan Keluarga Penerima Manfaat. Pada tahun ini sasaran kegiatan berjumlah 8 kelompok
- f. Penumbuhan/Pengembangan Usaha Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) FM;

Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan.

KUBE FM adalah himpunan dari keluarga yang tergolong fakir miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas dasar prakarsanya sendiri, saling berinteraksi satu sama lain dan tinggal dalam satu wilayah tertentu dengan tujuan meningkatkan produktivitas anggotanya. Bantuan ini diberikan kepada 7 kelompok di Kota Solok, 140 kelompok di Kabupaten Pasaman, dan 20 kelompok di Kabupaten Pasaman.

- g. Rapat Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/ Rastra
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau rastra adalah program bantuan pangan untuk masyarakat miskin dengan nilai bantuan Rp110.000 per

bulan. Penyaluran bantuan kepada penerima yang berdasarkan basis data terpadu (BDT) melalui Himpunan Bank Negara (Himbara). Rapat monitoring ini diikuti oleh 50 orang peserta.

- h. Bantuan Penumbuhan Usaha melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) FM Pedesaan;

Kegiatan ini dilaksanakan agar KUBE yang diberikan bantuan stimulan dapat meningkatkan kesejahteraan anggota KUBE. Sasaran sejumlah 730 kk/ 73 kelompok usaha bersama yang berlokasi di Kab. Padang Pariaman, Kab. Agam, Kab. Pasaman, Kab. Sijunjung, Kab. Dharmasraya, dan Kab. Tanah Datar.

- i. Bimbingan Pemantapan Pendamping KUBE PFM Pedesaan;
Kegiatan ini diikuti oleh 50 orang Pendamping KUBE Pedesaan.
- j. Rapat Evaluasi Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi BDT Kab/Kota
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau rastra diberikan kepada masyarakat miskin sesuai Basis Data Terpadu (BDT). Agar tepat sasaran dan menjamin kebenaran data maka dilakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan yang ada di kabupaten/ kota. Rapat evaluasi ini diikuti oleh 57 orang peserta.

p) Program Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba

Adapun kegiatan pada program ini sebagai berikut:

- a. Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan dan Bimbingan Sosial Korban NAPZA/HIV

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kepercayaan diri bagi korban HIV dalam menjalankan fungsi sosialnya di masyarakat. Kegiatan yang dilakukan adalah pelatihan keterampilan menyulam dan membuat *handycraft* dari barang-barang bekas tak terpakai untuk melatih korban HIV supaya dapat mengisi waktu dengan kegiatan yang positif dan produktif. Bimbingan ini diikuti oleh 20 orang peserta.

- b. Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan Bimtek Penanganan HIV bagi PSKS

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman PSKS tentang penanggulangan Narkoba serta memberikan pengetahuan terhadap pelajar tentang bahaya narkoba dan penyakit HIV. Sasaran kegiatan ini sebanyak 150 orang penyuluh narkoba dan 57 orang bimtek HIV.

c. Rapat Koordinasi Penguatan Lembaga RBM tentang Korban Penyalahgunaan NAPZA

Rapat ini bertujuan meningkatkan pengetahuan peserta tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat dan Lembaga Kesejahteraan Sosial bagi Korban Penyalahgunaan NAPZA yang diikuti oleh 55 orang peserta.

2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Adapun pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat kondisi tahun 2019 dapat dilihat pada tabel A.2.1 berikut ini:

No	Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Pencapaian Target	
			Jumlah	Persentase
1	Program Rehabilitasi Sosial			
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	150 orang panti sosial pemerintah dan 295 orang panti sosial swasta	100.00%
		a. Penyediaan Makanan	150 org x 365 hr x Rp. 27.500	100.00%
			295 org x 120 hr x Rp. 14.000 (pemberian beras)	100.00%
		b. Penyediaan Sandang	150 org x Rp. 3.487.000	100.00%
		c. Penyediaan asrama yang mudah diakses	Pemeliharaan asrama 2 UPTD	100.00%
		d. Alat Bantu	50 org x Rp. 120.000	100.00%
		e. Perbekalan Kesehatan	150 orang x Rp. 144.700	100.00%
		f. Bimbingan Fisik, mental spiritual dan sosial	150 orang x Rp. 1.017.870	100.00%
		g. Bimbingan keterampilan hidup sehari-hari	150 orang x Rp. 1.703.571	100.00%
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Persentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	366 orang panti sosial pemerintah dan 3.691 orang panti sosial swasta	100.00%
		a. Penyediaan Makanan	366 org x 365 hr x Rp. 27.500	100.00%

			3.691 org x 120 hr x Rp. 14.000 (pemberian beras)	100.00%
		b. Penyediaan Sandang	355 org x Rp. 2.488.698	100.00%
		c. Penyediaan asrama yang mudah diakses	3 unit pemeliharaan asrama/gedung	100.00%
		d. Perbekalan kesehatan	355 orang x Rp. 67.700	100.00%
			Honor Perawat 1 org x Rp. 2.387.988	100.00%
		e. Bimbingan fisik, mental dan spiritual	355 orang x Rp. 4.957.565	100.00%
		f. Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar	355 orang x Rp. 2.036.890	100.00%
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti Sosial	Persentase (%) Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	180 orang panti sosial pemerintah dan 45 orang panti sosial swasta	100.00%
		e. Penyediaan Makanan	180 org x 365 hr x Rp. 27.500	100.00%
			45 org x 120 hr x Rp. 14.000 (pemberian beras)	100.00%
		h. Penyediaan Sandang	180 org x Rp. 3.313.000	100.00%
		i. Penyediaan asrama yang mudah diakses	Pemeliharaan asrama 2 UPTD	100.00%
		j. Perbekalan Kesehatan	180 orang x Rp. 335.400	100.00%
			Honor Perawat 2 org x 12 bulan x Rp. 2.387.988	100.00%
		k. Bimbingan Fisik, mental spiritual dan sosial	180 orang x Rp. 1.017.870	100.00%
		l. Bimbingan keterampilan hidup sehari-hari	180 orang x Rp. 4.139.966	100.00%
		m. Pemulasaran	38 orang x 2 UPTD	100.00%
2	Perlindungan dan Jaminan Sosial			
1.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Daerah Provinsi	Persentase (%) Koerban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap dadurat bencana provinsi	Per kejadian	100.00%
		a. Permakanan	Bantuan logistik Bencana Alam	100.00%

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dinyatakan bahwa Dinas Sosial menyelenggarakan Urusan Bidang Sosial. Sebagai pelaksana urusan Pemerintahan Bidang Sosial, maka Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat memiliki kewenangan dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan pelayanan kesejahteraan sosial.

4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Adapun DUK Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat kondisi tahun 2018 dapat dilihat pada tabel A.4.1 di halaman berikut:

Tabel A.4.1. DUK Dinas Sosial Prov. Sumbar Tahun 2019

Jumlah Pegawai	Kualifikasi Pendidikan		Golongan			Pejabat Struktural		Fungsional	
	Pendidikan	Jumlah	Pangkat	Gol	Jumlah	Jabatan Struktural	Jumlah	Jabatan Fungsional	Jumlah
215	SD	13	Juru Muda	I/a		Kepala Seksi	36	Peksos Madya	
	SLTP/ SMP	13	Juru Muda Tk. 1	I/b		Kepa Sub Bagian	3	Peksos Penyelia	2
	SLTA	62	Juru	I/c	12	Kepala UPTD	8	Peksos Pelaksana Lanjutan	3
	D3	5	Juru Tk. 1	I/d	2	Kepala Bidang	4	Peksos Pelaksana	1
	S-1	108	Pengatur Muda	II/a	8	Sekretaris	1	Perawat Pelaksana	
	S-2	13	Pengatur Muda Tk. 1	II/b	10	Kepala Dinas	1	Penyuluh Sosial Muda	2
	S-3	1	Pengatur	II/c	30			Penyuluh Sosial Pertama	1
			Pengatur Tk. 1	II/d	2			Peksos Pelaksana Pemula	
			Penata Muda	III/a	13			Peksos Pertama	
			Penata Muda Tk. 1	III/b	24			Calon Peksos Pertama	
			Penata	III/c	25			Calon Penyuluh Sosial Pertama	1
			Penata Tk. 1	III/d	65			Peksos Muda	2
			Pembina	IV/a	12				
			Pembina Tk. 1	IV/b	9				
			Pembina Utama Muda	IV/c	0				
			Pembina Utama Madya	IV/d	0				

5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Adapun realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel A.5.1 di halaman berikut:

Tabel A.5.1. Realisasi Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Dana	Realisasi		
			Fisik (%)	Keuangan	Pers (%)

	BELANJA LANGSUNG	99.790.901.400	99.69%	92.224.954.341	92.42%
	BELANJA LANGSUNG UMUM	10.264.495.225	99.93%	9.833.037.797	95.80%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5,282.494.196	100%	5,048.320.246	95.57%
	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;	109.055.140	100.00%	108.978.940	99.93%
	2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;	896.379.960	100.00%	712.302.669	79.46%
	3) Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengaman, dan Sopir Kantor;	2,366.336.000	100.00%	2,347.851.949	99.22%
	4) Penyediaan Alat Tulis Kantor;	162.111.748	100.00%	161.747.758	99.78%
	5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;	95.746.600	100.00%	95.723.150	99.98%
	6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;	149.488.070	100.00%	149.138.218	99.77%
	7) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;	338.038.200	100.00%	332.027.190	99.22%
	8) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	58.216.000	100.00%	57.416,000	98.63%
	9) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	335.894.884	100.00%	324.648.140	96.65%
	10) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah;	464.902.973	100.00%	464.208.232	99.85%
	11) Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi;	37,770.021	100.00%	34.590.000	91.58%
	12) Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur.	97.422,000	100.00%	91.402,000	93.82%
	13) Penyediaan Makanan dan Minuman;	171.132.000	100.00%	168.286,000	98.34%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.381.311.384	99.82%	3.258.821.141	96.38%
	1) Pengadaan Meubeleur;	216.000,000	100.00%	215.350.455	100.00%
	2) Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi;	247.000,000	100.00%	244.378.950	98.94%
	3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio, Alat Komunikasi dan Informasi;	12.450,000	100.00%	12.450,000	100.00%
	4) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	419.040.000	100.00%	417.274.320	99.58%
	5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;	419.071.584	100.00%	371.182.522	88.57%
	6) Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi;	76.510,000	100.00%	76.469.353	99.95%
	7) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor;	1,148.000,000	100.00%	1,126.682.000	98.14%
	8) Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan;	76.913,000	100.00%	74.340,540	96.66%
	9) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan;	22.550,000	73.39%	15.221.087	67.50%
	10) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;	275,000,000	100.00%	245.068.250	89.12%
	12) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;	349.460.800	100.00%	344.715.664	98.64%
	13) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor;	52.796,000	100.00%	49.168,000	93.13%
	14) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Monumen dan Bangunan Bersejarah	66.520.000	100.00%	66.520.000	100.00%
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	151.200.000	100.00%	122.018.900	80.70%

	1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya.	151.200.000	100.00%	122.018.900	80.70%
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	57.266,000	100.00%	54.359,300	91.00%
	1) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.	57.266,000	100.00%	54.359.100	94.92%
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.392.223.645	99.95%	1.349.518.410	96.93%
	1) Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD;	318.265.395	100.00%	314.632.9205	98.86%
	2) Penatausahaan Keuangan SKPD	583.290.250	100.00%	575.898.650	98.73%
	3) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD;	38.051.400	100.00%	38.051.400	100.00%
	4) Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD;	132.989.050	100.00%	132.476.202	99.61%
	5) Penyusunan Sinergitas Program Antar Kab/Kota	111.629.750	100.00%	111.541.750	99.92%
	6) Pengelolaan, Pengawasan, dan Pengendalian Aset OPD	207.997.800	99.66%	176.917.488	85.06%
	BELANJA LANGSUNG WAJIB	42,016,411,411	94.33%	38,419,014,067	91.44%
6	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	293.159.750	99.85%	235.279.450	80.26%
	1) Bimbingan Teknis Satuan Bhakti Pekerja Sosial	68.120.600	100.00%	64.368.600	94.49%
	2) Sosialisasi Kegiatan Unit Institusi Layanan Sosial (UILS)	27.063.150	100.00%	25.783.150	95.27%
	3) Rujukan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	128.303.500	99.66%	76.365.200	59.52%
	4) Sosialisasi Program Penanganan Anak Bermasalah dengan Hukum (ABH)	69.672.500	100.00%	68.762.500	98.69%
7	Program Pembinaan Anak Terlantar	6,907.798.435	99.99%	6,808.100.117	98.56%
	1) Biaya Pendidikan Klien (Tri Murni);	315.486.300	100.00%	284.095.000	90.05%
	2) Tim PIPA (Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak)	50.931.100	100.00%	44.894.100	88.15%
	3) Pengadaan Kelengkapan (Biaya Klien);	924.063.625	100.00%	906.461.500	98.10%
	4) Penyediaan Obat-obatan dan Jasa Dokter;	26,452,000	100.00%	26,452,000	100.00%
	5) Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar (PSAABR Budi Utama Lubuk Alung);	549,634,652	100.00%	546.851.600	99.49%
	6) Seleksi Penerimaan Calon Kelayan;	45.530.000	100.00%	42.817.415	94.04%
	7) Penyediaan bahan Pendidikan Klien (Budi Utama);	205.360.000	100.00%	205.360.000	100.00%
	8) Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti (PSAABR Budi Utama Lubuk Alung);	250.850.000	100.00%	250.150.000	99.72%
	9) Rapat Koordinasi Pelayanan dan Rehabilitasi Kesos Anak;	160,536,500	100.00%	156.474.500	97.47%
	10) Pengadaan Makanan dan Minuman;	3.125.711.688	100.00%	3.124.986.368	99.98%
	11) Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar (PSBR Harapan Padang Panjang);	755.780.020	100.00%	723.897.084	95.78%

	12) Sehari Bersama Anak;	40.441.500	100.00%	40.441.500	100.00%
	13) Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti (Tri Murni);	457.021.050	100.00%	455.219.050	98.12%
8	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	3.267.522.575	100.00%	3.206.132.993	99.77%
	1) Penyediaan Bahan Obat-obatan dan Jasa Dokter;	21,601.800	100.00%	21,576.500	99.88%
	2) Rehabilitasi Sosial terhadap Penyandang Disabilitas melalui Loka Bina Karya (LBK);	113.422.850	100.00%	112.360.350	99.08%
	3) Biaya Kelengkapan Klien;	272.755.479	100.00%	271.760.000	99.64%
	4) Pemberian Penghargaan bagi Tokoh yang Peduli Penyandang Disabilitas.	83.103.000	100.00%	76.572.900	92.14%
	5) Pendayagunaan para Penyandang Disabilitas;	733.732.779	100.00%	698.145.300	95.15%
	6) Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Disabilitas;	445.528.267	100.00%	440.965.000	98.98%
	7) Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Disabilitas	445.528.267	100.00%	440.965.000	98.98%
	8) Penguatan Motivasi Penyandang Disabilitas.	22.130.130	100.00%	22.130.130	100.00%
	9) Bimbingan Sosial bagi PSM/ TSKK	132.559.500	100.00%	121.357.873	91.55%
	10) Biaya Makanan dan Minuman Kelayan;	1.442.688.770	100.00%	1,441,244.970	99.90%
9	Program Pembinaan Panti Lanjut Usia Terlantar	2.760.876.034	100.00%	2.746.948.462	99.50%
	1) Penyediaan bahan Obat-obatan dan Jasa Dokter;	67.973.900	100.00%	67.973.900	100.00%
	2) Biaya Jasa Penguburan/Pemulangan Klien;	37,000,000	100.00%	35,500,000	95.95%
	3) Lanjut Usia Berkreasi.	40.194.600	100.00%	40.194.600	100.00%
	4) Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti Jompo;	647.933.476	100.00%	637.670.484	98.42%
	5) Biaya Kelengkapan Klien Panti Jompo;	395.190.420	100.00%	393.623.600	99.60%
	6) Biaya Makanan dan Minimum Klien di Panti Jompo;	1.572.583.638	100.00%	1.570.485.878	99.87%
10	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	904.957.700	99.89%	903.682.156	99.86%
	1) Pengadaan Kelengkapan Klien;	118.600.000	100.00%	118.600.000	100.00%
	2) Biaya Obat-obatan dan Jasa Dokter;	22.492.000	100.00%	22.492.000	100.00%
	3) Pengadaan Makanan dan Minuman;	409.364.200	99.76%	408.168.656	99.71%
	4) Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial;	354.501.500	100.00%	354.421.500	99.98%
11	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	10.815.873.972	97.35%	9.307.887.224	86.06%
	1) Bimbingan Kapasitas bagi Pengurus Karang Taruna se-Sumatera Barat	5.980.745.000	99.84%	5.422.089.600	90.66%
	2) Penilaian PSKS (Karang Taruna, Orsos, PSM, TSKK) berprestasi Tingkat Sumatera Barat;	87,181,000	100.00%	86.224.000	98.90%
	3) Pertemuan Forum Komunitas Pekerja Sosial Masyarakat (FK-PSM) se-Sumatera Barat	50.798.000	100.00%	31,325,000	97.64%

	4) Bimbingan Kapasitas bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan se-Sumatera Barat	97.956,000	100.00%	80.996,000	82.69%
	5) KSN Expo dan Award dalam HKS;N;	22.106.000	100.00%	10.183.500	46.07%
	6) Pelatihan Lanjutan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) se-Sumatera Barat	369.973.250	100.00%	349.680.150	94.51%
	7) Penguatan Nilai-Nilai HKS;N;	133.730.200	100.00%	133.730.200	100.00%
	8) Bimbingan Jejaring Kerja LKS/Orsos se-Sumatera Barat dalam rangka Akreditasi	93.930.500	88.05%	79.988.300	85.16%
	9) Penguatan Peran LKS Posdaya dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Penyelenggaraan Kesos;	389.425.000	98.77%	265.781.000	68.25%
	10) Penguatan Kelembagaan LKKS Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat;	577.328.926	100.00%	486.315.200	84.24%
	11) Penyuluhan Kesejahteraan Sosial;	1.076.376.096	97.62%	769.449.324	71.49%
	12) Forum Komunikasi Pengurus Karang Taruna se-Sumatera Barat	54.550.000	100.00%	54.550.000	100.00%
	13) Pelatihan Dasar Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) se-Sumatera Barat	1.463.324.000	100.00%	1.129.293.950	77.17%
	14) Penguatan Peran Pilar dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	361.578,000	100.00%	340.976.000	94.30%
	15) Bimbingan Pengurus Organisasi Sosial se-Sumatera Barat;	56.872.000	84.91%	47.832.000	84.10%
12	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	54.095.239.520	99.98%	49.262.754.163	91.07%
	1) Penetapan calon Lokasi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT);	113.314.000	100.00%	110.126.300	97.19%
	2) Survey Kepuasan Kasyarakat	55.660.905	100.00%	55.360.900	99.46%
	3) Pengkajian Gelar Calon Pahlawan Nasional	105.283.000	100.00%	95.547.200	90.75%
	4) Pelayanan Orang Terlantar;	20.618.500	99.31%	20.475.500	99.3114%
	5) Sumbar Expo (Publikasi)	227.196.000	100.00%	216.904.609	95.47%
	6) Bimbingan Pemantapan Pengurus LK3 Kab/Kota	98.763.000	100.00%	93.963.846	95.14%
	7) Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Komunitas Adat Terpencil	52.322.000	100.00%	52.322.000	100.00%
	8) Bimbingan Teknis Pemantapan Petugas Pendata PMKS	156.468.835	95.91%	143.068.500	91.44%
	9) Sosialisasi Undian Gratis Berhadiah (UGB)	53.545.000	100.00%	46.605.000	87.04%
	10) Bimbingan Keterampilan Berusaha bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE);	53.178.715.840	99.99%	48.395.117.908	91.00%
	11) Pembuatan Buku Data PMKS dan PSKS	33.352.440	100.00%	33.262.400	99.73%
13	Program Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	497,293,180	97.97%	487,192,210	97.97%
	1) Bantuan Logistik Bencana;	100,917,000	100.00%	100,199,000	99.29%
	2) Rakor Bencana Sosial;	83.593.000	100.00%	81.893.000	97.97%

	3) Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Bencana Sosial;	66.363.400	100.00%	66.363.400	100.00%
	4) Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Bencana Alam	82.829.200	100.00%	81.843.250	98.81%
	5) Rakor Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH);	60.535.980	100.00%	60.535.980	98.95%
	6) Pemantapan Tim TRC Bencana Alam;	85.041.200	100.00%	85.041.200	100.00%
	7) Pemantapan Tim Psikososial Bencana Alam;	78.291.400	100.00%	78.287.400	99.99%
	8) Sinergitas Program Keluarga Harapan (PKH);	122.101.500	100.00%	111.701.500	91.48%
	9) Peningkatan Capacity Building Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);	121.771.500	100.00%	111.571.500	91.62%
14	Program Pemberdayaan Fakir Miskin	9.392.123.209	99.95%	8.858.969.394	94.32
	1) Bimbingan teknis Petugas Verifikasi dan Validasi BDT;	114.246.000	90.04%	98.552.000	86.26%
	2) Pengadaan Beras untuk Panti Swasta;	2.443.441.300	100.00%	2.443.176.300	99.99
	3) Bimbingan Pemantapan Pendamping Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);	119.553.309	94.43%	93.972.500	78.60%
	4) Seleksi dan Penghargaan KUBE dan Pendamping KUBE Berprestasi);	233.312.700	100.00%	179.253.100	76.83%
	5) Bantuan Pengembangan E-Warong KUBE Jasa Perkotaan dan UMKM	3.856.098.900	99.94	3.731.915.200	96.78%
	6) Penumbuhan /Pengembangan Usaha melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Pesisir dan Kepulauan	328.346.200	100.00%	297.238.550	90.53%
	7) Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai dan RASTRA Tahun 2019	195.735.300	100.00%	143.279.900	73.20%
	8) Bantuan Penumbuhan Usaha Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) FM Pedesaan	1.908.675.500	100.00%	1.698.453.044	88.99%
	9) Bimbingan Pemantapan Pendamping KUBE PFM Pedesaan	86.879.900	100.00%	81.934.600	94.31%
	10) Rapat Evaluasi Pelaksanaan Verifikasi BDT Kab/Kota	105.834.100	100.00%	91.193.400	86.17%
15	Program Pencegahan, Penanganan, dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba	287.410.800	100.00%	284.729.605	99.07%
	1) Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan dan Bimbingan Sosial Korban NAPZA/ HIV;	77.454.000	100.00%	77.454.000	100.00%
	2) Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan Bimtek Penanganan HIV bagi PSKS);	150.757.300	100.00%	149.557.300	99.20%
	3) Rapat Koordinasi Penguatan Lembaga RBM tentang Korban Penyalahgunaan Napza;	59.199.500	100.00%	57.718.305	97.50%
	Jumlah	99.790.901.400	99.69%	92.224.954.341	92.42%

6. Proses Perencanaan Pembangunan

Proses Perencanaan yang dilakukan dalam menyusun program Pembangunan Kesejahteraan Sosial mengacu kepada RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat dimana dimulai dari Penyusunan RENSTRA SKPD, RENJA SKPD dan RKA SKPD.

a. Penyusunan RENSTRA SKPD

Proses Penyusunan RENSTRA mengacu kepada Prioritas agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi, dimaksudkan untuk dapat memayungi dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) serta penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Prioritas RPJMD Bidang Sosial adalah Prioritas 8, yakni Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan, Pengangguran dan Daerah Tertinggal.

RENSTRA mencakup Visi dan Misi Program Kerja dan Kegiatan yang mengacu kepada RPJMD Bidang Sosial.

b. Rancangan RENJA SKPD

Rancangan Renja SKPD disusun oleh masing-masing SKPD untuk dibicarakan di forum SKPD kemudian dijadikan bahan Musrenbang tingkat Provinsi. Hasil Musrenbang dijadikan rancangan akhir RKPD kemudian ditetapkan menjadi RKPD. Hasil Penetapan RKPD dijadikan renja masing-masing SKPD.

c. RENJA SKPD

Renja SKPD berisikan rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD pada jangka waktu 1 tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra SKPD. Untuk menjaga konsistensi RKPD disusun dengan menggunakan Renja SKPD dan dikoordinasikan melalui forum SKPD. Renja SKPD mencakup rencana kerja yang disusun oleh SKPD dalam bentuk program dan kegiatan berikut kebutuhan dana dilaksanakan langsung oleh SKPD. Karena Renja SKPD adalah jabaran dari Renstra SKPD, maka program dan kegiatan yang ditetapkan harus lebih rinci, lengkap dengan indikator dan target kinerja.

d. RKA SKPD

RKA-SKPD adalah dokumen yang digunakan untuk penyusunan rencana dan anggaran SKPD yang antara lain memuat rencana program dan kegiatan serta

anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD. Sebelum ditetapkannya RKA SKPD, SKPD terlebih dahulu menyusun KUA/ PPAS.

RKA mencakup :

- 1) Informasi Program dan Kegiatan; dan
- 2) Informasi Anggaran.

Setelah RKA SKPD disusun, maka ditetapkan menjadi rincian APBD SKPD. Berdasarkan proses Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran tersebut setelah melalui Pembahasan dengan Tim Anggaran Provinsi dan DPRD maka ditetapkan APBD masing-masing SKPD yang dituangkan dalam bentuk DPA SKPD.

7. Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan baik APBD maupun APBN serta Tugas Pembantuan kurang memadai dengan tersedianya 9 (sembilan) Bangunan Kantor yang terdiri dari 1 bangunan kantor Dinas dan 8 bangunan Kantor UPTD yang didukung dengan fasilitas Jaringan Komputerisasi, Alat Transportasi roda 2 dan roda 4, adapun uraiannya sebagai berikut:

1. Beberapa unit gedung/ bangunan kantor dan asrama kelayan kondisinya mengalami kerusakan sehingga butuh direnovasi, di antaranya kantor dan gedung asrama kelayan UPTD PSKW Andam Dewi Solok, UPTD PSTW Sabai Nan Aluih, dan UPTD PSABR Budi Utama Lubuk Alung.
2. Peralatan praktek penyandang disabilitas pada tuna netra untuk saat ini telah menggunakan fasilitas komputer Braille yang juga didukung oleh instruktur yang berkompeten di bidang teknologi informasi.
3. Masih kurangnya kendaraan operasional pada Dinas dan 8 UPTD, sebagian yang ada sudah tidak layak pakai.
4. Peralatan dan Mesin di UPTD masih butuh pemeliharaan dan yang kondisinya rusak berat diusulkan untuk penghapusan.

8. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Penyelenggaraan urusan wajib yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat secara keseluruhan terlaksana dengan baik sesuai dengan yang telah direncanakan serta fisik kegiatan dapat terealisasi sesuai target. Namun, dari 14

program dan 115 kegiatan, terdapat 3 (tiga) kegiatan dengan realisasi yang dibawah 90% yakni sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyuluhan Kesejahteraan Sosial, dikarenakan Honor tidak dibayarkan untuk relawan penyuluh sosial dengan pertimbangan bahwa relawan belum melakukan kegiatan penyuluhan di lapangan serta adanya evisiensi dana pakaian kerja lapangan.
2. Kegiatan Penguatan Peran LKS Posdaya dalam Penanggulangan Kemiskinan, dengan alasan dalam pagu murni penggantian transport peserta indeksnya tidak sesuai dengan Pergub, sudah diajukan diperubahan namun tidak terakomodir, maka hanya dapat dilakukan untuk 5 lokasi saja.
3. Kegiatan Penguatan Kelembagaan LKKS, silpa perjadiin Konferensi Nasional Kesejahteraan Sosial, yang ditunda pelaksanaannya pada tahun 2020 karena pemerintah Gorontalo tidak menyediakan anggaran pendukung.

b. Solusi

Kegiatan yang tidak terlaksana bersifat evisiensi dan disesuaikan dengan peruntukannya.

BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

A. Tugas Pembantuan yang diterima

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum dari pelaksanaan Tugas Pembantuan adalah sebagai berikut :

- a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; dan
- b) DIPA Kementerian Sosial RI Nomor : SP DIPA- 027.03.4.089141/2019

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Tugas Pembantuan yang diterima oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat berasal dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.

3. Satuan Kerja Perangkat daerah yang Melaksanakan

Tugas Pembantuan (TP) Kementerian Sosial RI tahun 2019 dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

4. Program dan Kegiatan yang diterima dan pelaksanaannya.

Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

- a) Program Pemberdayaan Sosial dengan kegiatan :

Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil yang dilaksanakan dengan menyediakan rumah bagi warga KAT sebanyak 100 unit, memberikan bantuan jaminan hidup untuk 100 KK, memberikan bantuan peralatan (kerja & rumah tangga) dan bibit tanaman keras dan sertifikasi lahan bagi 100 KK warga KAT, serta menyediakan infrastruktur lainnya bagi warga KAT di Dusun Matektek Kabupaten Kepulauan Mentawai.

5. Jumlah Anggaran

Jumlah anggaran Tugas Pembantuan tahun 2019 sebesar : **Rp. 3.834.690.000,-**

6. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Realisasi Program Pemberdayaan Sosial sebagai berikut :

- a) Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) dengan Sub Kegiatan yang dilaksanakan:
 - 1) Pembangunan Rumah Sederhana bagi Warga KAT sebanyak 100 Unit di Dusun Matektek Kabupaten Kepulauan Mentawai;

- 2) Bantuan Pembangunan 1 Unit Balai Sosial di Dusun Matektek;
 - 3) Bantuan Jaminan Hidup Tahun I bagi Warga KAT untuk 100 KK di Dusun Matektek Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - 4) Bantuan Bibit Tanaman bagi Warga 100 Paket di Matektek;
 - 5) Bantuan Peralatan Kerja bagi Warga, 100 Paket di Dusun Matektek;
 - 6) Bantuan Peralatan Rumah Tangga untuk 100 Paket di Dusun Matektek;
- Realisasi Fisik Kegiatan = Rp. 3.834.490.000,- (100%) dan Realisasi Keuangan sebesar = Rp. 3.497.664.000,- (91.21%).

7. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Kegiatan Tugas Pembantuan yang sifatnya Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat hanya sebagai pelaksana, petunjuk kegiatan dan kerangka acuan di buat oleh Kementerian Sosial.

Untuk pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan tahun 2019 secara prinsip tidak terdapat permasalahan, semua kegiatan dapat berjalan sesuai waktunya dan rencana yang telah ditetapkan.

BAB. VII
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

F. Urusan Sosial (Dinas Sosial)

1) Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Jenis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sosial Daerah Provinsi terdiri atas :

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti;
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti;
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya penyandang dan pengemis di dalam panti; dan
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

2) Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Untuk target pencapaian SPM tahun 2019 telah tercapai sebesar 100% , kecuali pada kegiatan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya penyandang dan pengemis di dalam panti tidak terlaksana, karena Dinas Sosial Provinsi tidak memiliki Panti Tuna Sosial.

3) Realisasi

Realisasi kegiatan yang sesuai SPM sebagai berikut:

No	Program/ Kegiatan	Realisasi Fisik	%	Realisasi Keuangan	%
I	Program Pembinaan Anak Terlantar				
1	Pengadaan Makanan dan Minuman;	3.125.711.688	100.00%	3.124.986.368	99.98%
2	Pengadaan Kelengkapan (Biaya Klien);	924.063.625	100.00%	906.461.500	98.10%
3	Penyediaan Obat-obatan dan Jasa Dokter;	26,452,000	100.00%	26,452,000	100.00%
4	Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar (PSAABR Budi Utama Lubuk Alung);	549,634,652	100.00%	546.851.600	99.49%
5	Penyediaan bahan Pendidikan Klien (Budi Utama);	205.360.000	100.00%	205.360.000	100.00%
6	Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti (PSAABR Budi Utama Lubuk Alung);	250.850.000	100.00%	250.150.000	99.72%

No	Program/ Kegiatan	Realisasi Fisik	%	Realisasi Keuangan	%
7	Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar (PSBR Harapan Padang Panjang);	755.780.020	100.00%	723.897.084	95.78%
8	Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti (Tri Murni);	457.021.050	100.00%	455.219.050	98.12%
II Program Pembinaan Lanjut Usia Terlantar					
1	Penyediaan bahan Obat-obatan dan Jasa Dokter;	67.973.900	100.00%	67.973.900	100.00%
2	Biaya Jasa Penguburan/Pemulangan Klien;	37,000,000	100.00%	35,500,000	95.95%
3	Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti Jompo;	647.933.476	100.00%	637.670.484	98.42%
4	Biaya Kelengkapan Klien Panti Jompo;	395.190.420	100.00%	393.623.600	99.60%
5	Biaya Makanan dan Minimum Klien di Panti Jompo;	1.572.583.638	100.00%	1.570.485.878	99.87%
III Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma					
1	Penyediaan Bahan Obat-obatan dan Jasa Dokter;	21,601.800	100.00%	21,576.500	99.88%
2	Biaya Kelengkapan Klien;	272.755.479	100.00%	271.760.000	99.64%
3	Pendayagunaan para Penyandang Disabilitas;	733.732.779	100.00%	698.145.300	95.15%
4	Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Disabilitas;	445.528.267	100.00%	440.965.000	98.98%
5	Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Disabilitas	445.528.267	100.00%	440.965.000	98.98%
6	Biaya Makanan dan Minuman Kelayan;	1.442.688.770	100.00%	1,441,244.970	99.90%
IV Program Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial					
1	Bantuan Logistik Bencana;	100,917,000	100.00%	100,199,000	99.29%

4) Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk menunjang SPM tahun 2019 sebesar Rp. 14.653.789.164,-

5) Dukungan Personil

Untuk dukungan personil penunjang berjumlah 215 orang yang tersebar pada Kantor Dinas Sosial dan 8 UPTD.

6) Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 (Pasal 3) bahwa pelayanan sosial dasar dalam panti tidak menyatakan apakah panti yang dimaksud panti pemerintah atau panti swasta.
2. Jumlah penghuni panti pemerintah (8 UPTD) sebanyak 725 orang dan panti sosial swasta berjumlah 4000 orang.

3. Penghitungan terhadap kebutuhan pelayanan dasar dalam panti tersebut telah dilakukan sesuai Permensos Nomor 9 Tahun 2018, namun masih banyak kegiatan dalam panti yang tidak terakomodir.
- b. Solusi
1. Telah mengajukan surat ke Gubernur Sumatera Barat tentang kebutuhan dalam panti yang sesuai Permensos dimaksud.
 2. Menghitung analisa kebutuhan sesuai SPM .

IX.PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Program kesejahteraan sosial dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (UU No 11 Tahun 2009 pasal 1 dan 2).

Pembangunan Kesejahteraan Sosial merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pembangunan Nasional. Pembangunan Kesejahteraan Sosial berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini diemban oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat karena urusan sosial merupakan urusan yang menyangkut kepada pelayanan dasar terhadap masyarakat, khususnya bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Program pembangunan kesejahteraan sosial yang dirancang dalam Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021, pada tahun 2019 ini telah berjalan untuk tahun ke-4. Hasil yang dicapai dari program kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial telah dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosial kelompok masyarakat sasaran yang sangat rentan.

B. SARAN

- 1) Koordinasi dengan Kab/Kota terkait *updating* data PMKS sebagai dasar penyusunan program/kegiatan baik dari dana dekonsentrasi maupun dana desentralisasi, hal ini diharapkan untuk meminimalisir kesalahan dalam penentuan sasaran.
- 2) Perlunya optimalisasi program dan kegiatan yang berhubungan dengan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Padang, Januari 2020

Kepala Dinas

JUMAIDI,S.Pd.M.Pd.

NIP. 19670817 200003 1 006